



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Pariaman Nomor 91 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 91 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Pariaman Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 83 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Kota Pariaman Tahun 2022;

16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 91 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2022.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Pariaman Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 91) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 7 April 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR

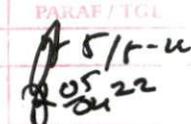
Diundangkan di Pariaman

pada tanggal 7 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 15

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|--|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| WALIKOTA PARIAMAN |  05/1-22 |
| SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH | 05/21-22 |
| PALANG HUKUM & HAM | 24/4.22 |
| PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN | 10/4-22 |

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 16 TAHUN 2022
 TAGGAL : 7 April 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG HARGA SATUAN POKOK
 KEGIATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----|---|--------|---------|
| I | SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI | | |
| 1 | GEDUNG BERTINGKAT | METER | 182.000 |
| 2 | GEDUNG TIDAK BERTINGKAT | METER | 124.000 |
| 3 | HALAMAN GEDUNG / BANGUNAN KANTOR | METER | 10.000 |

1. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
 - a gedung atau bangunan milik daerah; dan/ atau
 - b gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|------------|---|------------|------------------|
| I | Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas | | |
| | 1. Kendaraan Dinas Roda 2 | | |
| | - Usia kendaraan s/d 5 th | Unit/Tahun | 1.000.000 |
| | - Usia kendaraan diatas 5 th | Unit/Tahun | 1.500.000 |
| | 2. Kendaraan Dinas Roda 4 | | |
| | - Usia kendaraan 0 s/d 2 th | Unit/Tahun | 8.000.000 |
| | - Usia kendaraan 2 s/d 8 th | Unit/Tahun | 10.000.000 |
| | - Usia kendaraan diatas 8 th | Unit/Tahun | 12.000.000 |
| | 3. Kendaraan Dinas Roda 6 | | |
| | - Usia kendaraan 0 s/d 5 th | Unit/Tahun | 15.000.000 |
| | - Usia kendaraan diatas 5 th | Unit/Tahun | 20.000.000 |
| | 4. Becak Motor | Unit/Tahun | 3.000.000 |
| | 5. Becak Dayung | Unit/Tahun | 750.000 |
| | 6. Bachoe Loader | Unit/Tahun | 60.000.000 |
| | Catatan : <i>Untuk pemeliharaan kendaraan jabatan Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah disesuaikan dengan kebutuhan.</i> | | |
| II. | Kebutuhan BBM. | | |
| | a). Kebutuhan Operasional Harian Untuk Kendaraan Dinas | | |
| | 1. Roda 4 (Walikota) | Per Bulan | Sesuai Kebutuhan |
| | 2. Roda 4 (Wakil Walikota) | Per Bulan | Sesuai Kebutuhan |
| | 3. Roda 4 (Pimpinan DPRD dan Sekdako) | Per Bulan | Sesuai Kebutuhan |
| | 4. Roda 4 (Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Sek.DPRD, Ka.Badan, Ka.Dinas) | Per Bulan | 180 Liter |
| | 5. Roda 4 (Ka.kantor, Kabag, Camat) | Per Bulan | 120 Liter |
| | 6. Roda 4 (Sek/Kabid) /Kasi /Eselon IV/Ka. UPT) | Per Bulan | 100 Liter |
| | 7. Roda 4 (Kepala Rumah Sakit) | Per Bulan | 120 Liter |
| | 8. Ketua TP-PKK | Per Bulan | 150 Liter |
| | 9. GOW | Per Bulan | 120 Liter |
| | 10. Dharma Wanita | Per Bulan | 120 Liter |
| | 11. Roda 2 (Kabid, Kasubag, Kasubid, Kasi, Staf) | Per Bulan | 20 Liter |
| | 12. Bus Sekolah | Per Hari | 20 Liter |
| | 13. Bus Sekolah | Per Hari | 5 Liter |
| | 14. Kapal BaNus 88 | Per Hari | 10 Liter |
| | 15. Mobil M-CAP | Per Hari | 7 Liter |
| | 16. Mobil Ambulance RSUD Sadikin | Per Hari | 5 Liter |
| | 17. Genset M-CAP | Per Hari | 3 Liter |

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|-----------|
| | 18. Kendaraan roda 4 operasional Dishub (Patwal) | Per Hari | 4 Liter |
| | 19. Sepeda Motor Operasional Dishub/Pol PP (Motor CHIP) | Per Hari | 1 Liter |
| | 20. Kendaraan roda 4 operasional Puskesmas Keliling | Per Hari | 3 Liter |
| | 21. Kendaraan roda 4 operasional KP2TPM | Per Turun Survey Ke Lapangan Per Hari | 3 Liter |
| | Catatan : <i>Kebutuhan BBM pada Point 12 diperuntukan kebutuhan BBM operasional harian Bus Sekolah sedangkan Kebutuhan BBM pada Point 13 diperuntukan kebutuhan BBM dalam rangka memanaskan Bus Sekolah pada saat bus sekolah tidak beroperasi.</i> | | |
| | b). Kebutuhan BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus untuk Roda 4 dan Roda 6 (BPBD, Damkar, Pol PP, Dinas PUPR dan Pertanahan UPT PJU dan Alat Berat DLL) | | |
| | 1. HINO | Per Bulan | 120 liter |
| | 2. FUSO | Per Bulan | 120 liter |
| | 3. PS | Per Bulan | 120 liter |
| | 4. RESCUE | Per Bulan | 75 liter |
| | 5. Carry | Per Bulan | 75 liter |
| | 6. Mobil Sky Lift | Per Bulan | 300 liter |
| | 7. Dump Truck | Per Bulan | 75 liter |
| | 8. Excavator | Per Bulan | 75 liter |
| | 9. Excavator Mini | Per Hari | 42 Liter |
| | 10. Mesin Gilas | Per Bulan | 75 liter |
| | 11. Mobil MCK Roda 6 | Per Hari | 1 liter |
| | 12. Kapal Rescue Polyteline / Manta | Per Hari | 1 liter |
| | 13. Generator | Per Minggu | 2 liter |
| | 14. Mesin chainsaw | Per Minggu | 2 liter |
| | Catatan : <i>Kebutuhan BBM excavator pada Poin 8 diperuntukan kebutuhan BBM excavator dalam rangka memanaskan mesin, sedangkan kebutuhan BBM pada poin 9 diperuntukan kebutuhan BBM operasional excavator mini sesuai dengan surat perintah tugas (SPT) maksimal 20 hari per bulan.</i> | | |
| | c). Belanja Bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional kebersihan. | | |
| | 1. Bachoe Loader | Per Hari Per 20 Hari Per Bulan | 50 Liter |
| | 2. Mobil Operasional Pick Up | Per Bulan | 200 Liter |
| | 3. Chain Saw | Per Bulan | 20 Liter |
| | 4. Truk Sampah | Per Hari | 20 Liter |
| | 5. Truk Amrol | Per Satu Trip Per Kontainer | 10 Liter |

| | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------------|
| | 6. Truk Tangki Air | Per Hari | 10 Liter |
| | 7. Becak Motor | Per Hari | 4 Liter |
| | 8. Mesin Potong Rumput | Per Hari | 2 Liter |
| | 9. Generator Tangki Air | Per Hari | 2 Liter |
| | 10. Mesin Pencacah Kompos | Per Hari | 1 Liter |
| | 11. Mesin Pencacah Plastik | Per Hari | 1 Liter |
| | 12. Roda 2 Pengawas Lapangan | Per Hari | 1 Liter |
| | e) Untuk Kebutuhan penggunaan BBM diluar operasional harian setiap kendaraan dinas dapat diberikan tambahan BBM, sebesar | | |
| | 1. Padang/ Padang Pariaman/Padang Panjang | Per Kendaraan | 15 Liter |
| | 2. Bukittinggi/Agam/ Kota Solok | Per Kendaraan | 20 Liter |
| | 3. Kabupaten Solok/Payakumbuh/50 Kota/Tanah Datar/ Pesisir Selatan/ Sawahlunto | Per Kendaraan | 30 Liter |
| | 4. Sijunjung/Pasaman Barat | Per Kendaraan | 40 Liter |
| | 5. Dharmasraya/Pasaman/Solok Selatan | Per Kendaraan | 55 Liter |
| | e). Untuk Kebutuhan Penggunaan BBM bagi Operasional Khusus dapat diberikan BBM sebesar : | | |
| | Uraian | per kejadian / dalam kota | per kejadian / luar kota |
| | 1. Pemadam Kebakaran/Roda 6 | 50 Liter | 100 liter |
| | 2. Alat Berat (BPBD) | 150 Liter | 250 liter |
| | 3. Truk/bus roda 6 (BPBD) | 50 liter | 100 liter |
| | 4. Mobil MCK | 30 Liter | 70 liter |
| | 5. Kapal Rescue polyteline | 150 Liter | 250 liter |
| | 6. Kapal Rescue Manta | 200 liter | 300 liter |
| | 7. Kapal Patroli/ Rescue | 45 Liter | 100 liter |
| | 8. Perahu Dolpin | 45 Liter | 100 liter |
| | 9. Perahu Aluminium | 35 Liter | 70 liter |
| | 10. Perahu karet | 30 liter | 30 liter |
| | 11. Perahu Fiber | 20 Liter | 20 liter |
| | 12. Jetsky | 45 Liter | 45 liter |
| | 13. Sepeda motor operasional | 5 liter | 15 liter |
| | 14. Motor ATV | 5 Liter | 5 liter |
| | 15. Mobil Rescue | 25 Liter | 35 liter |
| | 16. Genset | 15 Liter | 15 liter |
| | 17. Mesin Chain Saw | 5 Liter | 5 liter |
| | Catatan: <i>Untuk bantuan BBM Luar Kota dapat diberikan dalam rangka membantu daerah lain yang mendapat musibah dibuktikan dengan dokumen pendukung.</i> | | |

| f). Untuk Kebutuhan Penggunaan BBM bagi Patroli Pengawalan (Patwal) dapat diberikan BBM sebesar : | | | |
|--|--|--------------|----------|
| | 1. Dalam Kota Pariaman | Per Kejadian | 8 Liter |
| | 2. Padang/ Bukittinggi/ Agam/ Pd. Pariaman | Per Kejadian | 25 liter |
| | 3. Kab. Solok/ Payakumbuh/ 50 Kota/ Tanah Datar/ Pesisir Selatan/ Sawahlunto | Per Kejadian | 35 liter |
| | 4. Sijunjung/ Pasaman Barat | Per Kejadian | 45 liter |
| | 5. Dharmasraya/ Pasaman/ Solok Selatan | Per Kejadian | 55 liter |

1. Kebutuhan BBM merupakan kuota maksimal.
2. Untuk pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan Riil dan menggunakan bukti resmi yang dikeluarkan SPBU sebagai pertanggungjawaban.
3. Untuk Roda 4 Operasional Khusus apabila ada kejadian saat di operasikannya kendaraan mengacu kepada besaran BBM perkejadian.
4. Untuk Kebutuhan penggunaan BBM diluar operasional harian setiap kendaraan dinas dapat diberikan tambahan BBM.
5. Tambahan BBM tersebut diberikan dalam rangka memenuhi undangan resmi.
6. Dalam rangka koordinasi khusus yang mempergunakan kendaraan dinas, dapat diberikan tambahan BBM dengan persetujuan **Sekretaris Daerah**.
7. Untuk pertanggungjawaban harus melampirkan bon BBM.
8. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau *overhaul*.

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-----------|---|----------------|----------------|
| I | SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR | | |
| 1 | Biaya Pemeliharaan Alat / Perlengkapan Kantor. | | |
| | 1. Mesin Tik Rusak Ringan | Unit Per Tahun | 200.000 |
| | 2. Faximile Rusak Ringan/Sedang | Unit Per Tahun | 500.000 |
| | 3. Faximile Rusak Berat | Unit Per Tahun | 750.000 |
| | 4. Pendingin Ruangan/AC | Unit Per Tahun | 500.000 |
| | 6. Projector | Unit Per Tahun | 500.000 |
| | 8. Kamera | Unit Per Tahun | 500.000 |
| | 9. Wireless | Unit Per Tahun | 500.000 |
| | 10. Filling Kabinet | Unit Per Tahun | 250.000 |
| | 11. TV | Unit Per Tahun | 300.000 |

| | | | |
|----------|------------------------------------|----------------|------------|
| | 12. HT (Handy Talky) | Unit Per Tahun | 300.000 |
| | 13. Router/Jaringan | Unit Per Tahun | 10.000.000 |
| | 14. Server | Unit Per Tahun | 10.000.000 |
| | 15. Kamera SLR | Unit Per Tahun | 1.500.000 |
| | 16. Maintenance Server | Unit Per Tahun | 2.000.000 |
| | 17. Generator Set | Unit Per Tahun | 5.000.000 |
| | 18. Brangkas | Unit per tahun | 1.000.000 |
| | 19. Layar Interaktif | Unit per tahun | 35.000.000 |
| | 20. Mesin Absensi | Unit per tahun | 500.000 |
| | 21. CCTV 8 channel | Unit per tahun | 400.000 |
| | 21. CCTV 16 channel | Unit per tahun | 800.000 |
| | 22. Mesin Pompa Air | Unit per tahun | 500.000 |
| | 23. Container | Unit per tahun | 5.000.000 |
| | 24. Bak Sampah Permanen | Unit per tahun | 750.000 |
| | 25. Kulkas | Unit per tahun | 400.000 |
| | 26. Water Heater | Unit per tahun | 2.000.000 |
| | 27. Mesin kemasan | Unit per tahun | 8.500.000 |
| | 28. Meubeler (Meja, Kursi) | Unit per tahun | 100.000 |
| | 29. Drone | Unit per tahun | 1.500.000 |
| | 30. Alat Selam | Unit per tahun | 6.000.000 |
| | 31. Personal Computer/ Notebook | Unit per tahun | 730.000 |
| | 32. Printer | Unit per tahun | 690.000 |
| | 33. AC Split | Unit per tahun | 610.000 |
| | 34. Genset lebih kecil dari 50 KVA | Unit per tahun | 7.190.000 |
| | 35. Genset 75 KVA | Unit per tahun | 8.640.000 |
| | 36. Genset 100 KVA | Unit per tahun | 10.150.000 |
| | 37. Genset 125 KVA | Unit per tahun | 10.780.000 |
| | 38. Gensef 150 KVA | Unit per tahun | 13.260.000 |
| | 39. Genset 175 KVA | Unit per tahun | 14.810.000 |
| | 40. Genset 200 KVA | Unit per tahun | 15.850.000 |
| | 41. Genset 250 KVA | Unit per tahun | 16.790.000 |
| | 42. Genset 275 KVA | Unit per tahun | 17.760.000 |
| | 43. Genset 300 KVA | Unit per tahun | 20.960.000 |
| | 44. Genset 350 KVA | Unit per tahun | 22.960.000 |
| | 45. Gensel43o KVA | Unit per tahun | 25.620.000 |
| | 46.Genset 1500 KVA | Unit per tahun | 31.770.000 |
| | | | |
| 2 | Belanja Jasa Service. | | |
| | 1. Mesin Potong Rumput | Unit Per Tahun | 500.000 |
| | 2. Chain Saw | Unit Per Tahun | 500.000 |
| | 3. Container | Unit Per Tahun | 5.000.000 |
| | 4. Becak Dayung | Unit Per Tahun | 500.000 |
| | 5. Gerobak Sampah | Unit Per Tahun | 500.000 |
| | 6. Bak Sampah Permanen | Unit Per Tahun | 750.000 |
| | 7. Gerobak Sorong | Unit Per Tahun | 100.000 |
| | 8. Mesin Pompa Air | Unit Per Tahun | 500.000 |

| | | | |
|-----------|---|----------------|------------|
| | 9. Mesin Pencacah Kompos | Unit Per Tahun | 1.000.000 |
| | 10. Mesin Pencacah Plastik | Unit Per Tahun | 1.000.000 |
| 3. | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kebencanaan BPBD | | |
| | 1. Kapal Operasional | | |
| | a. Service | Unit Per Tahun | 12.000.000 |
| | b. suku cadang | | 8.000.000 |
| | 2. Jet Sky | | |
| | a. Service | Unit Per Tahun | 4.800.000 |
| | b. Suku Cadang | | 2.700.000 |
| | 3. Perahu Operasional | | |
| | a. Service | Unit Per Tahun | 2.400.000 |
| | b. Suku Cadang | | 2.700.000 |
| | 4. Generator | | |
| | a. Service | Unit Per Tahun | 2.000.000 |
| | a. Suku Cadang | | 3.000.000 |
| | 5. Mesin Chainsaw | | |
| | a. Service | Unit Per Tahun | 1.500.000 |
| | b. Suku Cadang | | 2.000.000 |
| | 6. Motor ATV | | |
| | a. Service | Unit Per Tahun | 1.000.000 |
| | b. suku cadang | | 2.000.000 |
| | 7. Alat Selam | | |
| | a. Service | Unit Per Tahun | 2.000.000 |
| | b. suku cadang | | 4.000.000 |
| | Catatan : | | |
| | Sebelum melakukan perbaikan harus dilakukan cek fisik oleh Tim Penilai. | | |
| 5. | Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan. | | |
| | Pemeliharaan alat medis gigi, tensimeter, cold chain, dll | Paket | 500.000 |

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/ notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|-----------|
| KEPALA BAKU | PARAF/TGL |
| | 25/11-22 |
| KEPALA BIDANG | 05/12-22 |
| KEPALA SUB BIDANG | |
| KEPALA PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN | 26/11-22 |

KWALIKOTA PARIAMAN, *[Signature]*
[Signature]
 19 GENIUS UMAR *[Signature]*